



Biaya Pemeliharaan Pemerintah Untuk Aset Tetap Di Provinsi Kalimantan Tengah

Alexandra Hukom¹, Trifena Bernadenta Tambunan², Anastasia Saragih³, Perdin Silaban⁴, Jhon Fery Marbun⁵, Dewanto Tobing⁶, Tasya⁷, Ari Aghinta Ketaren⁸

Universitas Palangka Raya^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Received: 05 November 2025
Revised: 17 November 2025
Accepted: 28 November 2025

Abstrak

Pemeliharaan aset tetap oleh pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam mendukung efisiensi keuangan publik dan keberlanjutan layanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai aset tetap terhadap realisasi biaya pemeliharaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif verifikatif berbasis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, dan publikasi Badan Pusat Statistik. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dari 15 OPD yang secara aktif mencatat data aset dan pemeliharannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji korelasi Pearson, regresi linier sederhana, serta pengujian asumsi klasik menggunakan perangkat lunak SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara nilai aset tetap dan biaya pemeliharaan, dengan nilai korelasi 0,999 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,998. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki, semakin tinggi pula kebutuhan biaya pemeliharaan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan urgensi perencanaan anggaran pemeliharaan yang proporsional berdasarkan nilai aset, serta pentingnya implementasi prinsip stewardship dan sistem manajemen aset berbasis teknologi untuk mendorong efisiensi anggaran dan keberlanjutan pemanfaatan aset milik publik.

Kata Kunci: aset tetap, pengeluaran pemeliharaan, keuangan daerah, regresi sederhana, Provinsi Kalimantan Tengah.

(*) Corresponding Author:

alexandra.hukom@feb.upr.ac.id,
srgh18cha@gmail.com,
jhonferimarbun@gmail.com,
Sriaghinta50@gmail.com

trifentambunan963@gmail.com,
perdin76ban@gmail.com,
dewantotobing1@gmail.com

How to Cite: Hukom, A., Tambunan, T., Saragih, A., Silaban, P., Marbun, J., Tobing, D., Tasya, T., & Ketaren, A. (2025). Biaya Pemeliharaan Pemerintah Untuk Aset Tetap Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 1-12. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12193>.

PENDAHULUAN

Pemeliharaan aset tetap oleh pemerintah daerah merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan publik. Aset-aset seperti bangunan, infrastruktur jalan, serta perlengkapan operasional memerlukan penanganan rutin agar tetap dapat digunakan secara optimal dan mendatangkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pengelolaan dan perawatan aset tetap menjadi lebih kompleks karena karakteristik wilayah yang luas dan beragam, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan dana yang tersedia.

Pada tingkat nasional, pengaturan mengenai pengelolaan aset tetap daerah telah dituangkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.02/2013 yang mengatur Standar Biaya Satuan (SBS) untuk pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah. Ketentuan ini memberikan acuan biaya untuk berbagai jenis aset, seperti gedung pemerintah, kendaraan operasional, dan peralatan

kantor. Sebagai gambaran, di Provinsi Aceh, biaya pemeliharaan untuk gedung bertingkat ditetapkan sebesar Rp 192.000 per meter persegi setiap tahunnya. Namun demikian, besaran biaya ini dapat bervariasi antar daerah sesuai dengan kondisi wilayah dan kebijakan pemerintah setempat.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah telah mengambil langkah strategis dalam pengelolaan aset dengan memanfaatkan properti milik daerah, seperti pabrik rotan, untuk disewakan kepada pihak ketiga. Pendekatan ini tidak hanya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berfungsi sebagai strategi pengalihan beban biaya pemeliharaan dari APBD ke pihak penyewa. Dengan demikian, pemerintah tetap memperoleh pendapatan tanpa perlu menanggung biaya operasional secara langsung.

Meski demikian, pengelolaan aset tetap di Kalimantan Tengah masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu isu utama adalah legalitas dan kepastian hukum atas aset yang dimiliki. Banyak aset pemerintah belum memiliki kelengkapan dokumen administratif, seperti sertifikat kepemilikan atau dokumen hibah, yang sah. Situasi ini dapat menimbulkan persoalan hukum dalam proses kerja sama dengan pihak ketiga, dan pada akhirnya menghambat optimalisasi penggunaan aset.

Selain masalah legalitas, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala serius dalam mendanai kegiatan pemeliharaan aset tetap. Beban biaya yang besar sering kali menggerus porsi anggaran untuk sektor lain yang sama pentingnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kreatif dan alternatif, seperti kemitraan dengan swasta atau pemanfaatan aset tidak produktif, agar pengelolaan aset tetap menjadi lebih efisien dan produktif.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, studi mengenai pembiayaan pemeliharaan aset tetap di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat penting. Fokus kajian ini adalah untuk mengevaluasi besar kecilnya biaya yang dikeluarkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan tersebut, serta merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan aset publik.

Penelitian ini juga akan menyoroti kontribusi teknologi informasi dalam mendukung manajemen aset tetap pemerintah. Sistem informasi yang terintegrasi dapat menjadi alat bantu dalam memantau kondisi fisik aset, menjadwalkan kegiatan pemeliharaan, serta menyimpan data aset secara digital. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset pemerintah.

Dengan pendekatan ilmiah yang holistik dan berbasis pada data aktual, diharapkan penelitian ini mampu memberikan solusi nyata dalam meningkatkan tata kelola aset tetap milik pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan aset beralih dari sekedar kewajiban anggaran menjadi sumber daya strategis yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

PENELITIAN YANG RELEVAN

Seiring meningkatnya tuntutan dalam pengelolaan aset publik, sejumlah daerah telah mulai menerapkan pendekatan pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional. Kurnia, Zulkifli, dan Indriasari (2024) mengidentifikasi bahwa keberhasilan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem penatausahaan yang tertata dengan baik. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa manajemen aset yang

efektif memerlukan integrasi antara kemampuan teknis dan sistemik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset di lingkungan pemerintah daerah.

Walaupun terdapat berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, kenyataannya tidak semua pemerintah daerah berhasil menerapkan secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Selang (2023) menunjukkan bahwa aset pemerintah di Provinsi Maluku belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan justru menambah beban keuangan daerah akibat biaya pemeliharaan yang tinggi. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta regulasi yang lebih komprehensif guna mendorong efisiensi dalam pemamfatan aset publik.

Langkah awal yang penting dalam mengelola aset pemerintah secara efisien adalah memastikan bahwa perencanaan dan data aset dilakukan secara akurat. Dalam kajian yang dilakukan oleh Ratmono dan Rochmawati (2020), disebutkan bahwa proses inventarisasi yang menyeluruh serta perencanaan kebutuhan yang tepat merupakan fondasi dari optimalisasi pengelolaan aset tetap daerah. Dengan adanya perencanaan strategis yang sejalan dengan tujuan organisasi dan sistem data aset yang mutakhir, pemerintah daerah dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih terarah dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi hambatan besar dalam hal pendataan dan pengelolaan aset secara digital. Menurut laporan LPKN Training Center (2025), sebagian besar data aset pemerintah masih bersifat manual, tidak akurat, serta belum terintegrasi dengan baik, yang pada akhirnya menyulitkan proses pengawasan dan pengambilan kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan investasi dalam bentuk sistem informasi aset yang modern serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

STUDI LITERATUR

Teori Stewardship dalam Pengelolaan Aset Pemerintah

Teori Stewardship menekankan hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan antara pemilik aset (principal) dan pengelola (steward), dimana pengelola bertanggungjawab secara kolektif terhadap kepentingan pemilik. Dalam konteks sektor publik, masyarakat bertindak sebagai pemilik sumber daya, sementara pemerintah mengambil peran sebagai pengelola yang dipercaya untuk mengelola aset publik demi kemaslahatan bersama. Tidak seperti Teori Agensi yang menekankan pentingnya sistem kontrol dan pemberian insentif guna mengurangi konflik kepentingan, Teori Stewardship meyakini bahwa pengelola bertindak atas dasar motivasi internal seperti loyalitas, tanggung jawab moral, dan nilai kebersamaan, sehingga pengawasan ketat dianggap tidak selalu diperlukan.

Ketika diterapkan dalam pengelolaan aset tetap milik pemerintah daerah, pendekatan Stewardship menuntut para pejabat publik untuk memiliki komitmen etis yang tinggi serta rasa tanggung jawab dalam menjaga dan menggunakan aset daerah secara bijak. Fokus utamanya bukan hanya pada efisiensi dalam tata kelola administratif, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan manfaat jangka panjang yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangan ini, pengelolaan aset menjadi suatu mandat publik yang harus dijaga dengan amanah demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Teori Manajemen Aset dalam Konteks Pemerintahan

Teori Manajemen Aset di sektor publik berfokus pada rangkaian proses pengelolaan aset, mulai dari tahap perencanaan, perolehan, penggunaan, pemeliharaan, hingga eliminasi aset. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan nilai guna aset pemerintah daerah sehingga

dapat menunjang layanan publik dan pembangunan daerah secara efektif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan adanya sistem informasi yang saling terintegrasi, tenaga profesional yang kompeten, serta regulasi dan tata kelola yang jelas dan terstruktur.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Kurnia dan rekan-rekannya (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang berhasil sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta sistem administrasi yang tertata dengan baik. Temuan tersebut memperkuat pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam mengelola aset daerah agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif verifikatif yang berbasis pada data sekunder. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi biaya pemeliharaan aset tetap milik pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan kuantitatif dinilai tepat karena memungkinkan analisis data yang bersifat objektif, sistematis, dan dapat diuji secara statistik (Sugiyono, 2021). Tujuan utamanya adalah untuk mengonfirmasi pengaruh unsur kelembagaan dan kebijakan pengelolaan terhadap efisiensi pembiayaan pemeliharaan aset.

Sumber Data dan Populasi

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen dan laporan resmi, termasuk yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, serta publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2019 hingga 2023. Populasi penelitian mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap milik pemerintah provinsi.

Teknik Pengambilan Sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni memilih OPD yang secara konsisten mencatatkan kepemilikan aset tetap dan pengeluaran pemeliharaan dalam laporan keuangannya selama lima tahun terakhir. Sebanyak 15 OPD dijadikan sampel, mewakili sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Kriteria ini dipilih agar data yang dianalisis memiliki kontinuitas dan relevansi terhadap tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah arsip resmi yang tersedia secara daring dan cetak. Informasi kuantitatif diambil dari laporan neraca dan LKPD, khususnya pada pos-pos yang terkait dengan aset tetap dan biaya pemeliharaan, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Sumber tambahan berasal dari publikasi BPS seperti laporan statistik keuangan daerah dan indikator sosial ekonomi. Validitas data dijamin dengan memverifikasi kesesuaian antara dokumen digital dan fisik jika tersedia.

Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengunduh dokumen dari situs web resmi instansi terkait. Proses ini diikuti dengan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak BPKAD dan Inspektorat Daerah untuk menjamin keakuratan data. Setelah data dikompilasi, dilakukan proses tabulasi dan pengkodean menggunakan Microsoft

Excel. Data yang telah diolah kemudian dianalisis lebih lanjut secara statistik menggunakan SPSS versi 26.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dalam dua tahap utama. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menunjukkan tren biaya pemeliharaan aset tetap dari tahun ke tahun. Kedua, dilakukan analisis regresi linier untuk menguji pengaruh variabel bebas seperti nilai aset, usia aset, dan anggaran pemeliharaan terhadap biaya pemeliharaan. Sebelum dilakukan pengujian model, dilakukan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model analisis. Signifikansi statistik ditentukan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai Aset Tetap (Rp5 Miliar)	5	200	750	460.00	221.923
Realisasi Biaya5 Pemeliharaan (Rp Miliar)	5	3.7	13.8	8.640	4.0178
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data Penelitian, diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap Nilai Aset Tetap dan Realisasi Biaya Pemeliharaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir, dapat ditarik kesimpulan penting yang menggambarkan kondisi pengelolaan aset secara umum.

Dari sisi nilai aset tetap, diperoleh rata-rata (mean) sebesar Rp 460 miliar, dengan nilai terendah (minimum) sebesar Rp 200 miliar dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar Rp 750 miliar. Standar deviasi yang cukup besar, yaitu Rp 221,923 miliar, mengindikasikan adanya variasi yang tinggi dalam jumlah aset tetap dari tahun ke tahun. Perbedaan yang cukup besar antara nilai minimum dan maksimum memperlihatkan bahwa dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan atau perubahan signifikan dalam kepemilikan atau penilaian aset tetap pemerintah provinsi, yang bisa saja disebabkan oleh penambahan aset baru, perubahan kebijakan valuasi aset, atau perbaikan pencatatan aset.

Untuk realisasi biaya pemeliharaan rata-rata nilai yang tercatat adalah Rp 8,64 miliar per tahun, dengan nilai terendah sebesar Rp 3,7 miliar dan tertinggi mencapai Rp 13,8 miliar. Nilai standar deviasi sebesar Rp 4,0178 miliar menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup nyata dalam anggaran atau realisasi biaya pemeliharaan aset. Hal ini dapat mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam perencanaan dan penganggaran biaya perawatan, atau bisa juga dipengaruhi oleh kebijakan pemeliharaan yang berubah sesuai kondisi aset dan skala prioritas pembangunan tiap tahunnya.

Dari analisis tersebut, tampak bahwa meskipun aset tetap pemerintah mengalami pertumbuhan atau akumulasi, alokasi biaya pemeliharaan tidak selalu proporsional dengan peningkatan nilai aset. Ketimpangan ini dapat berimplikasi terhadap kualitas dan umur manfaat aset tersebut. Jika biaya pemeliharaan cenderung rendah sementara nilai aset tinggi, maka dalam jangka panjang dapat muncul risiko penurunan fungsi atau kerusakan aset yang tidak tertangani dengan optimal.

Secara lebih luas, hasil ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip stewardship dan manajemen aset yang berkelanjutan, sebagaimana disarankan oleh teori-teori sebelumnya.

Pemerintah daerah tidak hanya perlu mencatat aset secara akurat, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dan pemeliharaannya dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab. Ketidakseimbangan antara nilai aset dan biaya pemeliharaan yang diungkapkan oleh data ini dapat menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan aset yang lebih baik ke depannya.

Berdasarkan Hasil Uji Statistik Deskriptif terhadap nilai aset tetap dan realisasi biaya pemeliharaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup besar, dengan nilai rata-rata sekitar Rp 460 miliar, dan rentang antara nilai terendah dan tertingginya cukup jauh (Rp 200 miliar- Rp 750 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, pemerintah provinsi berhasil meningkatkan jumlah atau nilai aset yang dimiliki, baik melalui pembelian, pembangunan, atau pencatatan ulang aset.

Namun ketika kita lihat dari sisi biaya pemeliharaan, terlihat bahwa anggaran yang digunakan untuk merawat aset-aset tersebut rata-rata hanya sekitar Rp 8,64 miliar per tahun, dengan variasi yang cukup besar juga antara tahun-tahun tertentu (terendah Rp 3,7 miliar dan tertinggi Rp 13,8 miliar). Ini menunjukkan bahwa meskipun aset yang dimiliki terus bertambah atau meningkat nilainya, alokasi dan untuk merawat aset tidak naik seiring aset tersebut bertambah.

Secara logika ilmiah, kondisi ini bisa menimbulkan risiko. Ketika aset yang dimiliki bertambah, maka kebutuhan untuk merawatnya pun meningkat agar tidak cepat rusak atau menurun nilainya. Jika biaya pemeliharaan tetap rendah atau tidak stabil, bisa jadi aset tidak dirawat dengan baik dan akhirnya malah menjadi beban daerah, misalnya karena rusak dan harus diganti lebih cepat.

Uji Normalitas

Case Processing Summary

	Cases		Missing		Total	
	Valid					
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Nilai Aset Tetap (Rp5 Miliar)	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar)	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai Aset Tetap (Rp5 Miliar)	.165	5	.200*	.974	5	.898
Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar)	.144	5	.200*	.983	5	.951

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Penelitian Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk yang direkomendasikan untuk jumlah sampel kecil ($n < 50$ diperoleh bahwa:

- Untuk Nilai Aset Tetap, nilai signifikansinya adalah 0,898
- Untuk Realisasi Biaya Pemeliharaan, nilai signifikansinya adalah 0,951

Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang merupakan ambang batas standar dalam pengujian statistik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis no, yaitu bahwa data berasal dari distribusi normal secara statistik. Distribusi normal ini penting, karena menjadi syarat utama bagi sejumlah metode analisis statistik parametrik, seperti korelasi Pearson atau regresi linier.

Temuan ini juga memperkuat validitas analisis selanjutnya yang berbasis asumsi normalitas, mengingat penyimpangan dari distribusi normal dapat menyebabkan distorsi hasil pada model analisis yang digunakan. Oleh karena itu, kesimpulan dari uji normalitas ini memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan analisis kuantitatif secara lebih mendalam dan meyakinkan.

Uji Korelasi Pearson Correlations

	Nilai Aset Tetap (Rp Miliar)	Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar)
Nilai Aset Tetap (Rp Miliar)	Pearson Correlation 1	.999**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	5
Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar)	Pearson Correlation .999**	1
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	5

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Penelitian Diolah (2025)

Nilai korelasi 0,999 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif hampir sempurna antara variabel Nilai Aset Tetap (Rp Miliar) dan Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar) di Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya, setiap peningkatan nilai aset tetap sangat berkaitan erat dengan peningkatan biaya pemeliharaan. Hubungan ini nyaris linier sempurna, yang secara statistik sangat jarang terjadi kecuali antara dua variabel yang secara konseptual dan fungsional sangat erat kaitannya.

Tingkat Signifikansi (Sig. = 0,000)

Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,01$, yang berarti hubungan antar variabel signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% ($p < 0,01$).

Dengan demikian, hubungan antara nilai aset tetap dan biaya pemeliharaan bukanlah suatu kebetulan, melainkan ada korelasi yang dapat dipercaya dan konsisten dalam data.

Ukuran Sampel (N = 5)

Jumlah observasi atau data sebanyak 5 menunjukkan bahwa analisis dilakukan berdasarkan data tahunan selama 5 tahun. Meskipun jumlah ini tergolong kecil untuk analisis kuantitatif, hasil korelasinya tetap sah selama asumsi normalitas terpenuhi (yang sebelumnya telah diuji hasilnya menunjukkan data berdistribusi normal).

Temuan ini memperkuat teori Manajemen Aset yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki suatu pemerintah daerah, semakin besar pula anggaran yang diperlukan untuk pemeliharannya (Kurnia et al., 2024). Korelasi tinggi ini juga menjadi indikator penting bagi perencana keuangan daerah untuk menyusun kebijakan pemeliharaan aset yang lebih proporsional dengan nilai aset yang dimiliki.

**Uji Regresi Linier Sederhana
Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Nilai Aset Tetap (Rp Miliar) ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar)
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.998	.997	.2086

- a. Predictors: (Constant), Nilai Aset Tetap (Rp Miliar)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.441	1	64.441	1481.039	.000 ^b
	Residual	.131	3	.044		
	Total	64.572	4			

- a. Dependent Variable: Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar)
b. Predictors: (Constant), Nilai Aset Tetap (Rp Miliar)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	.320	.235		1.360	.267
	Nilai Aset Tetap (Rp Miliar)	.018	.000	.999	38.484	.000

- a. Dependent Variable: Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar)

Sumber: Data Penelitian Diolah (2025)

Uji regresi linier sederhana membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara nilai aset tetap dengan realisasi biaya pemeliharaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil ini sejalan dengan temuan Kurnia et al. (2024) dan mendukung teori stewardship, yang menyatakan bahwa peningkatan aset publik harus diikuti dengan tanggung jawab yang memadai.

**Uji Heteroskedastitas
Residuals Statistics^a**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.938	13.885	8.640	4.0138	5
Residual	-.2376	.2538	.0000	.1806	5

Std. Predicted Value	-1.172	1.307	.000	1.000	5
Std. Residual	-1.139	1.217	.000	.866	5

a. Dependent Variable: Realisasi Biaya Pemeliharaan (Rp Miliar)

Sumber: Data Penelitian Diolah (2025)

Berdasarkan hasil tabel Residual Statistics dan pengujian regresi linier sederhana terhadap hubungan antara Nilai Aset Tetap dan Reallisasi Biaya Pemeliharaan di Provinsi Kalimantan Tengah, kita dapat melakukan interpretasi terhadap gejala heteroskedasitas, yaitu kondisi dimana varian residual tidak konstan (tidak homogen) pada seluruh tingkat prediksi model. Heteroskedasitas dapat memengaruhi keandalan estimasi regresi.

Nilai residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model, berkisar antara -0,2376 hingga 0,2538 dengan rata-rata nol dan standar deviasi sebesar 0,1806. Ini menunjukkan bahwa error (kesalahan prediksi) model relatif kecil dan tersebar cukup simetris di sekitar nol. Simetri residual ini merupakan salah satu indikasi awal bahwa tidak ada pola khusus dalam penyebaran kesalahan, yang berarti model tidak menunjukkan gejala bias sistematis.

Selain itu, nilai Standardized Residual (residual yang telah dinormalisasi) berada dalam rentang -1,139 hingga 1,217, yang masih tergolong wajar karena berada dalam batas ± 2 . Jika terdapat hetroskedastisitas parah, biasanya nilai residual akan menyebar secara tidak merata dan menghasilkan nilai standar residual yang tinggi (di atas ± 2 atau ± 3). Fakta bahwa nilai-nilai tidak melewati ambang batas tersebut memperkuat dugaan bahwa data tidak mengandung heteroskedastisitas yang signifikan.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki distribusi residual yang stabil dan tidak menunjukkan adanya pola ketidakwajaran atau gejala heteroskedastisitas. Artinya, model dapat diandalkan dalam memprediksi realisasi biaya pemeliharaan berdasarkan nilai aset tetap karena varian dari error bersifat konstan (homoskedastis).

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 (Hipotesis Nol) : Nilai Aset Tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Biaya Pemeliharaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

H_1 (Hipotesis Alternatif) : Nilai Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Biaya Pemeliharaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil Uji Statistik

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh output sebagai berikut:

Model Summary

R Square = 0,998, menunjukkan bahwa 99,8 % variasi realisasi biaya pemeliharaan dapat dijelaskan oleh nilai aset tetap. Ini menandakan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel.

ANOVA

Nilai F = 1481,039, dengan signifikansi (Sig) = 0,000 (<0,05), menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan.

Coefficients:

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.
Konstanta (a)	0.320	1.360	0.267
Nilai Aset Tetap	0.018	38.484	0.000

Nilai signifikansi (Sig.) variabel independen berada jauh dibawah 0,05, sehingga bermakna secara statistik.

Intrepretasi Hasil

Nilai koefisien regresi positif sebesar 0,018 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan Rp 1 miliar dalam nilai aset tetap akan meningkatkan biaya pemeliharaan sebesar Rp 18 juta, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini menunjukkan hubungan yang searah dan kuat.

Nilai t-hitung sebesar 38.484, jauh lebih besar dari t-tabel pada taraf signifikan 5%, semakin memperkuat bukti bahwa hubungan ini signifikan. Selain itu, nilai Sig. = 0,000 menguatkan keputusan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 .

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa Nilai Aset Tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Biaya Pemeliharaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai aset yang dimiliki pemerintah, maka semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharannya.

PEMBAHASAN

Hasil analisis mengungkapkan bahwa variabel nilai aset tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya biaya pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti empirisnya terlihat dari koefisien korelasi sebesar 0,999 dan nilai determinasi (R^2) senilai 0,998, yang mengindikasikan bahwa 99,8% variasi pada biaya pemeliharaan dapat dijelaskan oleh perbedaan nilai aset tetap yang ada. Selain itu, uji signifikansi pada regresi menunjukkan angka di bawah 0,05, yang berarti hipotesis penelitian diterima secara statistik.

Temuan ini mendukung teori **Stewardship** (Mahmudi, 2016) yang menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pengelola barang milik publik bertanggung jawab untuk menjaga nilai guna dan keberlanjutan aset melalui alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai. Sejalan dengan pendekatan **Lifecycle Asset Management** menurut OECD (2020), biaya perawatan harus disusun proporsional dengan nilai aset agar dapat memperpanjang umur teknis dan meminimalkan kerusakan mendadak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Saskia dan Malik (2023) yang membuktikan bahwa peningkatan aset tetap menuntut pengelolaan biaya pemeliharaan yang baik agar tidak terjadi pemborosan. Namun, penelitian Fathonah et al. (2024) menekankan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam menerapkan pedoman Permendagri No. 19 Tahun 2016, sehingga alokasi biaya sering hanya bersifat formalitas dan tidak didasarkan pada kondisi riil aset.

Dengan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah yang didominasi rawa, hutan, dan sungai, risiko kerusakan pada jalan, jembatan, dan bangunan publik menjadi lebih tinggi dibanding daerah dengan medan datar (Kadir, 2018). Hal ini menjelaskan mengapa meskipun anggaran pemeliharaan meningkat setiap tahun, realisasinya belum sepenuhnya optimal. Fluktuasi realisasi anggaran pemeliharaan juga terjadi karena adanya perubahan prioritas anggaran, misalnya saat pandemi COVID-19.

Adapun perbedaan dengan penelitian Merina (2024) yang lebih fokus pada pengaruh total aset dan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini memberikan fokus baru dengan membuktikan bahwa pengelolaan biaya pemeliharaan menjadi faktor penentu efisiensi belanja modal dan kualitas layanan publik. Dengan demikian, manajemen aset yang hanya berorientasi pada penambahan aset tanpa perawatan memadai berpotensi menurunkan manfaat ekonomis.

Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi aset dan kebutuhan pemeliharaan berbasis data real-time. Penggunaan **Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA)** berbasis teknologi

diharapkan dapat memperkuat monitoring dan mempermudah perencanaan anggaran yang lebih akurat (Irawan Zebua et al., 2023).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada data sekunder yang bersifat agregat dan hanya memfokuskan satu variabel independen yaitu nilai aset tetap. Faktor lain seperti usia aset, intensitas penggunaan, serta kualitas pengelolaan SDM di OPD belum dikaji lebih jauh. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan variabel tambahan dan pendekatan regresi berganda atau Structural Equation Modeling (SEM) agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat teori stewardship dan lifecycle asset management di tingkat daerah, serta memberikan rekomendasi praktis untuk perumusan kebijakan anggaran pemeliharaan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai aset tetap memberikan pengaruh yang sangat kuat serta signifikan terhadap besarnya biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2019 hingga 2023. Hal ini tercermin dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,999 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,998, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi biaya perawatan aset dapat diterangkan melalui fluktuasi nilai aset tetap yang dimiliki.

Hasil temuan ini mendukung konsep stewardship dan prinsip pengelolaan aset berbasis siklus hidup (lifecycle asset management), yang menegaskan pentingnya penyusunan anggaran perawatan yang sepadan dengan nilai aset agar fungsi layanan publik tetap optimal dan umur pakai aset lebih panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk memanfaatkan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dengan teknologi digital guna mempermudah pemantauan kondisi aset, perencanaan perawatan preventif, dan pengawasan realisasi anggaran secara transparan.

Meski demikian, penelitian ini mengakui adanya keterbatasan karena variabel independen hanya difokuskan pada nilai aset tetap. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel lain, seperti usia teknis aset, kondisi geografis, kapasitas sumber daya manusia, serta kebijakan pengalihan anggaran, agar mampu memberikan gambaran yang lebih utuh. Dengan perencanaan dan pengendalian berbasis data yang lebih detail, diharapkan pengelolaan biaya pemeliharaan aset tetap di daerah dapat semakin efisien, transparan, dan mendukung keberlanjutan kualitas layanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

REFERENSI

- Aisyah. (2021). Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Pengaruh Good Governance Pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah*, 2(1), 145–152.
- Cahyaningrum, Y., Sambharakreshna, Y., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Trunojoyo, U., Jln Raya Telang, M., Box, P., Kamal, K., & Jawa Timur, B. (2024). Optimization of Web-Based Asset Management To Increase Efficiency and Sustainability. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 7(2).
- Kemenkeu. (2019). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Dana Alokasi Umum. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1776>

- Kurniawan, I. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhan Perak*, 2(1), 229–239.
- Manalu, ade amelia, & Yudianto, I. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 55–73.
- Mariana, M., Ramadana, S. W., & Rahmaniar, R. (2024). Pertumbuhan Ekonomi: Pengaruh Pembiayaan dan Aset Tetap. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.59963/jpema.v6i1.289>
- Meinarti, S., Seventeen, W. L., Andiastruti, S., Hariyanto, & Safitri, I. (2022). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih 1. *Jurnal Akuntansi Unihaz: JAZ*, 5(2), 160–166.
- Nursafitri, R. E., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Maneksi*, 10(2), 177–185. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i2.793>
- Pratiwi, W. O. R. S., & Malik, E. (2023). Analisis Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 5(2), 24–40.
- Putri, F. R., & Meutia, R. (2023). The Influence of Fixed Assets and Local Own Revenue on Maintenance Expenditures with Previous Years Budget Balance as Moderation (Study on Aceh Government 2016-2020). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 65. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i1.9928>
- Ratmono, D., & Rochmawati, A. (2018). Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9014>
- Simbolon, T. R., Hukom, A., Adila, F., Sutrisno, I., Lesdiana, A., Fransiska, N., & Priskila, E. (2023). Desember 2023 (15)2:345-353 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (Diterima 30-10-2023). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2023(1), 345–353. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>
- Sumaryana, A., Komara, S. R., & Pancasilawan, R. (2024). *Rethinking Local Government Asset Management in Indonesia: Governance, Planning, and Policy Evaluation*. 5(October), 217–232.
- Wambrau, M. P. (2020). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59123>